

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hkum, Cetakan Keenam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana (Edisi Reviwi)*. Jakarta. Ghalia.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Interasional*. Jakarta. Rajawali Press.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid1)*. Jakarta.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2016. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- Mertokusumo, Soedikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.
- Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Presnada Media.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Unram Press.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritik, Praktik, dan Masalahnya*. Bandung. PT Alumni.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Pola dan Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta.



- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Integritas Nasional*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Purwoleksenono, Didik Endro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Renggong, Ruslan. 2019. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP*. Makassar. Prenadamedia Group.
- Rohmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Pengantar)*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Makassar. Kencana Prenada Media Group.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sulistiani, Lies. 2009. *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Sumantri, I. 1996. *Pembahasan Perkembangan Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Publishing.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Thurmudhi, Imam. 2006. *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia : Perbandingan di Amerika dan Eropa*. Sinar Grafika.
- Wijaya, Firman. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta. Penaku.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- \_\_\_\_\_. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)
- \_\_\_\_\_. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) 2009* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan
- \_\_\_\_\_. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

## Jurnal

- Susanti, Ante. 2013. *Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jurnal Lex Crimen. Vol II. No 2.
- Hafid, Zhulfiana Pratiwi. 2019. *Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam.

- Luntungan, Geraldo Angelo. 2018. *Surat sebagai Alat Bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol VII. No. 5.
- P.S, Ayu Diah dan Ni Tengah A. 2018. *Pengaturan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum. Vol 7. No 5.
- Satria, Hariman. 2016. *Menakar Perlindungan Justice Collaborator*. Jurnal Konstitusi. Vol. 13. No. 2.
- Syarif, Daniel Juan Miguel. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Privatum. Vol. VIII. No. 2.

